

Katalog : 4102002.3307

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WONOSOBO 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

Katalog: 4102002.3307

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo

2023

<https://wonosobokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WONOSOBO 2023

Katalog: 4102002.3307

ISBN: -

Nomor Publikasi: 33070.24007

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xvi + 58 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Pembuat Cover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Penerbit:

© BPS Kabupaten Wonosobo

Ilustrasi Cover:

Anak Sekolah

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

TIM PENYUSUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN WONOSOBO 2023

Pengarah:

Dr. Mustaqim, SST, SE, M.Si.

Penanggung jawab:

Dr. Mustaqim, SST, SE, M.Si.

Penyunting:

Rizki Arifin, SST, M.Ec.Dev.

Penulis Naskah:

Budi Setyo Wibowo

Pengolah Data:

Budi Setyo Wibowo.

Penata Letak:

Agung Bintoro Aji, SST.

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sejalan hal tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo berupaya untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan terkait pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo secara berkesinambungan. Metode penyajian dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif sederhana menggunakan pendekatan table dan grafik untuk mempermudah pengguna dalam memahami perkembangan capaian IPM beserta indikator penyusunnya. Dengan adanya publikasi ini diharapkan pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Harapan kami publikasi yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo 2023” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna data sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Wonosobo, 19 Juni 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wonosobo



Dr. Mustaqim, SST, SE, M.Si.

DAFTAR ISI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN WONOSOBO 2023

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
Infografis	xv
Bab 1	
Pendahuluan	1
Bab 2	
Indeks Pembangunan Manusia dan Pengukurannya	7
2.1 Konsep Dasar Pembangunan	9
2.2 Konsep Dasar Pembangunan Manusia	10
2.3 Pengukuran Pembangunan Manusia	12
2.4 Metodologi Pengukuran IPM	14
2.5 Kategori Peringkat Pembangunan Manusia	18

Bab 3		
Potret Pembangunan Manusia di Kabupaten Wonosobo		19
3.1	Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo	21
3.2	Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	24
3.3	Dimensi Pengetahuan	28
3.3.1	Harapan Lama Sekolah	28
3.3.2	Rata-rata Lama Sekolah	29
3.4	Dimensi Standar Hidup Layak	32
Bab 4		
Capaian dan Tantangan		35
4.1	Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan	37
4.2	Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan	45
4.3	Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	55

DAFTAR TABEL

3.1	Nilai Komponen IPM Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023	24
4.1	APS Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023	41
4.2	APM Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023	42
4.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023	54

DAFTAR GAMBAR

2.1	Perkembangan Penghitungan IPM	13
3.1	IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2023	22
3.2	Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2021-2023	23
3.3	Komponen Penghitungan IPM	25
3.4	Umur Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2020-2023	26
3.5	Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023	27
3.6	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2016-2023	28
3.7	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023	29
3.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2016-2023	30
3.9	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023	31
3.10	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan per tahun di Kabupaten Wonosobo, 2016-2023	33
3.11	Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun untuk Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023	33
4.1	Rasio Murid Guru Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	43
4.2	Rasio Murid Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	44

4.3	Rasio Guru Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	45
4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	46
4.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Wonosobo, 2023	48
4.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	50
4.7	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	52
4.8	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023	53
4.9	Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo, 2016-2023	56
4.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah, 2017-2023	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsep pembangunan manusia mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Sejalan konsep tersebut, UNDP dalam *Human Development Report (2016)* lebih memaknai pembangunan manusia sebagai segala sesuatu yang terkait dengan manusia, kebebasannya dalam memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya, serta keleluasaan untuk meningkatkan kemampuannya.

UNDP menyatakan bahwa konsep pembangunan manusia pada dasarnya dapat diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya terangkum dalam suatu indeks komposit, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diumumkan secara resmi oleh UNDP pada 1990.

Sampai dengan 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. Pada 2010, UNDP melakukan penyempurnaan dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama, namun menggunakan indikator dan metode agregasi yang berbeda. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2020-2023, IPM Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari 69,04 menjadi 70,18. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Wonosobo rata-rata tumbuh sebesar 0,38 poin (0,55 persen) per tahun. Pertumbuhan tahun 2023 sebesar

0,49 poin (0,70 persen) ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM pada tingkat nasional (0,84 persen) maupun tingkat provinsi (0,81 persen).

Nilai IPM tahun 2023 sebesar 70,18 menjadikan peringkat pembangunan manusia Kabupaten Wonosobo meningkat dari sedang menjadi tinggi. Sementara itu, jika dilihat menurut keterbandingan antarwilayah se-Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke-32. Sepanjang tahun 2020—2023 itu pula, capaian IPM Kabupaten Wonosobo berada di bawah capaian IPM Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan di Kabupaten Wonosobo masih di bawah kemajuan pembangunan di Jawa Tengah pada umumnya.

Pada 2023, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Wonosobo sebesar 74,01 tahun, meningkat 0,31 poin dibandingkan kondisi 2020. Sementara itu, selama kurun waktu 2020—2023, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren yang terus meningkat. Sampai dengan 2023, HLS Kabupaten Wonosobo mencapai 11,80 tahun. Angka ini meningkat 0,05 poin jika dibandingkan kondisi 2020.

Selanjutnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo naik 0,08 poin dibandingkan kondisi RLS 3 tahun yang lalu, menjadi 6,89 tahun. Seiring dengan peningkatan indikator-indikator sebelumnya, kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Wonosobo yang diukur dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan juga mengalami peningkatan. Tercatat pengeluaran per kapita per tahun di Kabupaten Wonosobo pada 2023 adalah sebesar 11,58 juta rupiah, naik 9,00 persen dibandingkan 2020 yang hanya 10,62 juta rupiah.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023

70,18

UMUR HARAPAN HIDUP
SAAT LAHIR

74,01 TAHUN

HARAPAN LAMA SEKOLAH

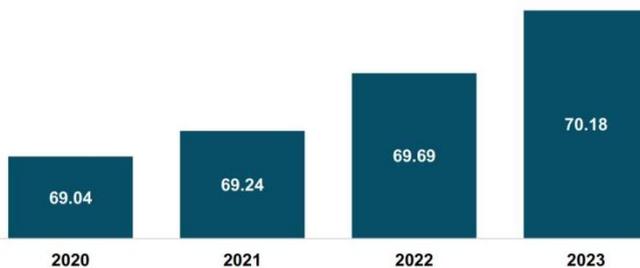
11,80 TAHUN

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

6,89 TAHUN

PENGELUARAN PERKAPITA
YANG DISESUAIKAN
(ribu rupiah/orang/tahun)

Rp. 11.577,-



Pertumbuhan IPM
2020—2023

▲ 1,65%

BAB 1

PENDAHULUAN

<https://wonosobokab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan memiliki makna yang sangat luas dan senantiasa berkembang. Pandangan tradisional memaknai pembangunan sebagai proses peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Alat ukur yang sering digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional/ regional bruto (*Gross National Product* disingkat *GNP*) dan pertumbuhan pendapatan nasional/ regional perkapita (*income per capita*). Sampai dengan era 1970-an, konsep pembangunan semata-mata dipandang sebagai sebuah fenomena ekonomi dan ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya level pendapatan per kapita dan pertumbuhannya. Wilayah atau negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan yang tinggi dianggap berhasil dalam mengelola proses pembangunan. Sebaliknya, jika level pendapatan per kapita dan pertumbuhannya rendah maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang kurang berkembang atau bahkan terbelakang. Pertumbuhan yang tinggi juga diyakini akan membawa manfaat bagi terciptanya kesempatan kerja di banyak sektor dan mampu mendorong kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih merata. Pada masa itu, banyak negara yang mengambil kebijakan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara persoalan bagaimana mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan sering kali menjadi prioritas berikutnya.

Seiring dengan perkembangan waktu dan kompleksnya persoalan yang melingkupinya, maka makna pembangunan semakin berkembang dan cakupannya juga senantiasa mengalami perluasan. Pandangan ekonomi baru memaknai pembangunan sebagai proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkesinambungan dari suatu sistem tatanan sosial atau masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan tidak sekedar merepresentasikan aspek ekonomi dalam mengejar akselerasi pertumbuhan, namun juga menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur atau tatanan sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Bank Dunia dalam salah satu publikasi yang dirilis menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan adalah

memperbaiki kualitas kehidupan manusia, terutama di negara-negara miskin dan terbelakang. Perbaikan kualitas kehidupan memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, namun masih ada syarat-syarat lainnya yang juga harus diperjuangkan yaitu kualitas pendidikan yang lebih baik, peningkatan nutrisi dan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu serta pelestarian aneka ragam budaya (Bank Dunia, 2001). Untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan, khususnya pembangunan manusia antarwilayah dan antarnegara maupun perkembangan antarwaktu diperlukan sebuah indikator yang mampu merangkum berbagai aspek dan dimensi dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang ditempuh oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* adalah merilis *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah sejak tahun 1990 (*Human Development Reports, 1990*).

Sejak saat itu, angka IPM telah menjadi salah satu alat ukur kinerja pembangunan manusia di wilayah atau negara sehingga dapat dijadikan salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu wilayah atau negara tersebut.

IPM mengukur pembangunan manusia jangka panjang dalam tiga dimensi dasar: Kehidupan yang panjang dan sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak. Kehidupan yang panjang dan sehat diukur dengan harapan hidup. Tingkat pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sedangkan standar hidup layak diukur dengan *Gross National Income (GNI)* atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang dikonversikan menggunakan *Purchasing Power Parity (PPP)* atau Paritas Daya Beli (*UNDP: Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update*).

Di Indonesia, IPM sudah dihitung dan disajikan sampai level provinsi dan kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga dapat dilakukan pengukuran dan perbandingan antar wilayah hingga level kabupaten/kota.

Tinggi atau rendahnya nilai IPM di suatu wilayah sangat ditentukan oleh banyak faktor seperti karakteristik sosial budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi geografis, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan sebagainya. Akan tetapi perubahan atau peningkatan IPM bukan merupakan proses yang instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses yang tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Perlu waktu yang cukup panjang untuk melihat seberapa besar perubahan capaian yang dihasilkan oleh proses pembangunan manusia, sehingga memerlukan penyajian indikator dalam bentuk data series yang cukup panjang.

<https://wonosobokab.bps.go.id>

BAB 2

Indeks Pembangunan Manusia dan Pengukurannya

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUKURANNYA

2.1. Konsep Dasar Pembangunan

Pembangunan manusia, menurut beberapa ahli sejatinya memiliki makna yang luas. Namun demikian, konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan ekonomi. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan ekonomi memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan, Meier dan Rouch (2000 dalam Arsyad, 2010) mengamati bagaimana strategi kebijakan pembangunan di awal dekade 1960-an fokus dilakukan. Kebijakan-kebijakan pembangunan kala itu lebih ditujukan pada maksimasi pertumbuhan PDB melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi.

Pada kenyataannya, strategi pembangunan konvensional tersebut justru mengarahkan pada 2 pilihan. Pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan dan pemerataan merupakan 2 kutub strategi pembangunan yang dalam prakteknya sering saling mengabaikan. Pembangunan yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi cenderung mengorbankan aspek pemerataan, begitu pun sebaliknya.

Seiring berjalannya waktu, paradigma pembangunan pun mulai berubah. Menurut Korten (1987), pembangunan adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat anggota masyarakat yang bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk mengerahkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia, demi menciptakan perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara bersinambungan dan adil, sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri. Hal tersebut didukung UNDP dalam *Human Development Report (HDR)*-nya yang pertama (1990), yang menyatakan bahwa:

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana, tetapi sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan (ekonomi) suatu negara, seperti dirangkum oleh Todaro dan Smith (2003 dalam Arsyad, 2010) dapat ditunjukkan dari 3 nilai pokok. Ketiga nilai pokok tersebut adalah: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

2.2. Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Sejalan konsep tersebut, UNDP dalam *Human Development Report 2016* lebih memaknai pembangunan manusia sebagai segala sesuatu yang terkait dengan manusia, kebebasannya dalam memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya, serta keleluasaan untuk meningkatkan kemampuannya.

Menurut *Human Development Report 2016*, pembangunan manusia adalah segala sesuatu yang terkait dengan kebebasan manusia, yaitu kebebasan untuk merealisasikan potensi dari setiap sisi kehidupan manusia secara utuh. Tidak hanya di sebagian tempat, namun di setiap sudut di seluruh penjuru dunia.

Beberapa ahli juga mengemukakan konsep pembangunan manusia yang menyiratkan bahwa pembangunan manusia memiliki aspek yang lebih

luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Amartya Sen (1989 dalam BPS, 2016) misalnya, mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan tersebut bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Pembangunan manusia adalah cara dan tujuan akhir.

Mahbub ul Haq (1995) juga mengemukakan hal serupa. Ia berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak. Oleh karena itu, pembangunan yang berawal dan bertitik tolak dari manusia serta dilakukan oleh manusia, sudah semestinya ditujukan juga untuk manusia (Arsyad, 2010; Daniela & Oana, 2015).

Kata Kunci Definisi Pembangunan Manusia:

- Pembangunan manusia berarti perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat, serta perluasan kapabilitas untuk memenuhi aspirasi.
- Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama. Keempat komponen tersebut adalah:

1. Produktivitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia

UNDP menyatakan bahwa konsep pembangunan manusia pada dasarnya dapat diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya terangkum dalam suatu indeks komposit, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diumumkan secara resmi oleh UNDP pada 1990. Pada awal diumumkan, dari ketiga dimensi ini diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Sampai dengan 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. Pada 2010, UNDP melakukan penyempurnaan dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama, namun menggunakan indikator dan metode agregasi yang berbeda. Kemudian, tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metodologi Baru).

Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.



Gambar 2.1. Perkembangan Penghitungan IPM

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.4. Metodologi Pengukuran IPM

Lebih dari 25 tahun IPM digunakan UNDP sebagai pengukuran pembangunan manusia. Di Indonesia, IPM mulai dihitung sejak 1996. Mulai saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun.

Sejak 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka *backcasting* dari tahun 2010.

Terdapat beberapa indikator dan metode penghitungan yang berubah dalam penghitungan IPM metode baru. Indikator dan metode dimaksud, yaitu:

1. Indikator angka melek huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (HLS).
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan PNB per kapita, karena PNB per kapita tidak tersedia hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penghitungan IPM di Indonesia menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Variabel-variabel berikut merupakan variabel dalam Penghitungan IPM Metode Baru:

1. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)
UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat

kesehatan suatu masyarakat, UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan (Sensus Penduduk 2010, Proyeksi Penduduk).

Pada tahun 2023 hasil SP2010 tidak lagi digunakan dalam penghitungan indikator UHH. Pelaksanaan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) telah menghasilkan parameter-parameter demografi yang baru sehingga penghitungan indikator UHH pada tahun 2023 sudah menggunakan hasil LF SP2020. Tidak hanya tahun 2023, hasil LF SP2020 ini juga digunakan untuk menghitung indikator UHH tahun 2020 sampai tahun 2022.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan setahun diperoleh dari susenas modul. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan

komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Perhitungan Paritas Daya Beli (*purcashing power parity*/PPP) berbasis formula Rao:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

keterangan:

- PPP_j : paritas daya beli di kab/kota j
P_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
P_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j
m : jumlah komoditas

Penghitungan IPM dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup = X₁, Pengetahuan = X₂ dan Standar Hidup Layak = X₃)

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

keterangan:

- X_i : Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, i= 1,2,3
X_{min} : Nilai minimum X_i
X_{maks} : Nilai Maksimum X_i

Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena

menggunakan ukuran rupiah. Berikut adalah nilai maksimum dan nilai minimum indikator komponen IPM:

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup (UHH)	85	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	15	0
Konsumsi Perkapita yang Disesuaikan	26.572.352*	1.007.436**

Sumber: BPS

* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

** Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

2. **Tahap kedua** perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks X_i dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

keterangan:

$I_{kesehatan}$: Indeks Angka Harapan Hidup

$I_{pendidikan}$: $\frac{1}{2}$ (Indeks Harapan Lama Sekolah + Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$I_{pengeluaran}$: Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan

3. **Tahap ketiga** adalah menghitung pertumbuhan IPM, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam satu tahun.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

keterangan:

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM pada tahun t-1

2.5. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,00–100,0. Adapun kategorinya adalah sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi : IPM lebih dari 80,0
2. Tinggi : IPM antara 70,0 – 79,9
3. Sedang : IPM antara 60,0 – 69,9
4. Rendah : IPM kurang dari 60,0

<https://wonosobokab.bps.go.id>

BAB 3

Potret Pembangunan Manusia di Kabupaten Wonosobo

POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN WONOSOBO

3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut. Hal tersebut bisa diartikan sebagai tantangan yang harus dihadapi dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi jarak yang harus ditempuh. IPM pun menjadi salah satu indikator penting yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, terutama dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Bertitik tolak dari hal tersebut, IPM seringkali dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan indikator target pembangunan pemerintah pada pembahasan asumsi makro di DPR-RI.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dan DAU memiliki hubungan timbal balik. Daerah dengan IPM tinggi maka kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) cenderung lebih tinggi, sedangkan daerah yang nilai IPM-nya rendah, kebutuhan fiskalnya jadi terhitung lebih rendah. Dengan kata lain, untuk mengejar akselerasi kemajuan pembangunan maka dibutuhkan IPM yang tinggi. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2020-2023, IPM Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari 69,04 menjadi 70,18. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Wonosobo rata-rata tumbuh sebesar 0,55 persen per tahun. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM pada tingkat nasional (0,72 persen) maupun tingkat provinsi (0,70 persen).

Selain itu, selama tahun 2020-2023 angka IPM Kabupaten Wonosobo menunjukkan pertumbuhan yang positif, hingga pada akhirnya status pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo berubah menjadi “tinggi” di tahun 2023, dimana tahun-tahun sebelumnya berstatus “sedang”. Nilai IPM

Kabupaten Wonosobo tahun 2023 tercatat sebesar 70,18, naik sekitar 0,49 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 69,69.



Gambar 3.1. IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2023

Laju pertumbuhan IPM adalah angka yang menunjukkan nilai pertumbuhan IPM dari tahun ke tahun. Dilihat dari gambar 3.2, pertumbuhan IPM Kabupaten Wonosobo dan nasional cenderung meningkat. Dari tahun ke tahun, terdapat percepatan pertumbuhan yang terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023 dengan pertumbuhan yang meningkat dari 0,29 persen menjadi 0,70 persen di tahun 2023 (Kabupaten Wonosobo) dan dari 0,48 persen menjadi 0,84 persen (nasional). Hal ini berbeda dengan Jawa Tengah yang pertumbuhan IPM-nya memiliki tren fluktuatif. Pada tahun 2023 Jawa Tengah justru mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,81 persen dibanding tahun 2022 yang mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 0,87 persen.



Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2021-2023

Dalam menggunakan angka IPM sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan, memerhatikan laju pertumbuhan IPM juga penting untuk dilakukan. Peringkat dalam angka IPM bukan hal yang mutlak sebagai pengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Justru pertumbuhan IPM merupakan indikator yang lebih baik dalam menentukan bagaimana suatu daerah membangun. Pertumbuhan nilai IPM yang tinggi menunjukkan performa pemerintah yang baik dalam pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, jika dilihat menurut keterbandingan antarwilayah se-Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke-32 di tahun 2023. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu. Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah Kabupaten Temanggung (nilai IPM 71,33), Kabupaten Magelang (nilai IPM 71,56), dan Kabupaten Kebumen (nilai IPM 71,88) dengan masing-masing berada di peringkat 27, 24, dan 23. Melihat kondisi ini, diperlukan usaha lebih keras lagi dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk dapat mengejar ketertinggalan dari ketiga daerah tersebut.

Tabel 3.1. Nilai Komponen IPM Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023

Kode Wilayah	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita per tahun Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	Peringkat IPM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Jawa Tengah	eks-Karesidenan Kedu
	INDONESIA	73,93	13,15	8,77	11 899	74,39		
3300	JAWA TENGAH	74,69	12,85	8,01	11 835	73,39		
3305	Kebumen	74,98	13,37	7,86	9 734	71,88	23	3
3306	Purworejo	75,37	13,53	8,46	11 110	74,35	14	2
3307	Wonosobo	74,01	11,80	6,89	11 577	70,18	32	6
3308	Magelang	74,44	12,61	7,82	10 493	71,56	24	4
3323	Temanggung	75,77	12,61	7,50	10 108	71,33	27	5
3371	Kota Magelang	77,22	14,40	11,20	13 175	81,17	4	1

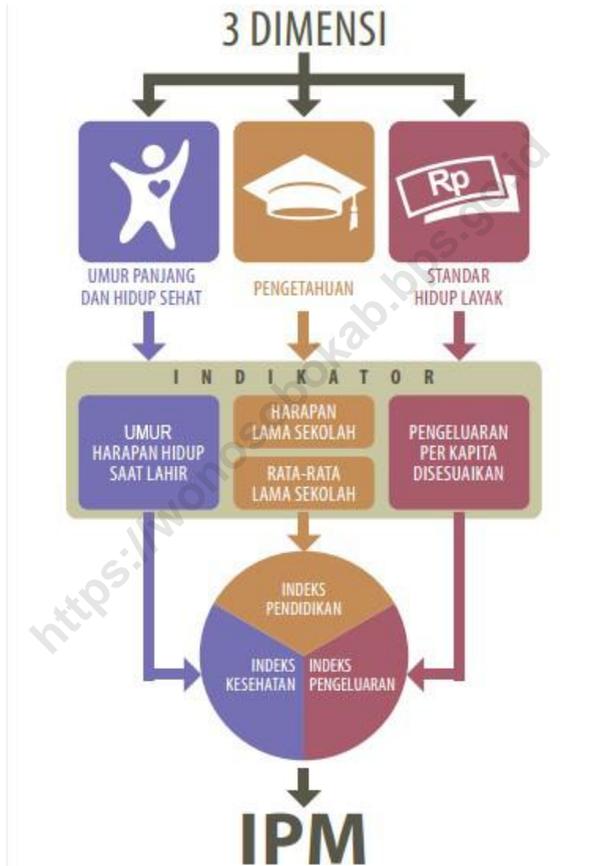
Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai IPM suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia, sejatinya dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan (Arsyad, 2010). Dengan demikian, besarnya proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia.

3.2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Telah disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa IPM disusun oleh 3 dimensi dasar, yaitu: **umur panjang dan hidup sehat**, yang diukur dengan Umur Harapan Hidup ketika lahir (E_0); **pengetahuan**, yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan **standar hidup**, yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita (*PPP - Purchasing Power*

Parity/paritas daya beli dalam satuan rupiah). Pada bahasan kali ini akan diuraikan capaian dari masing-masing indikator IPM Kabupaten Wonosobo per dimensi.

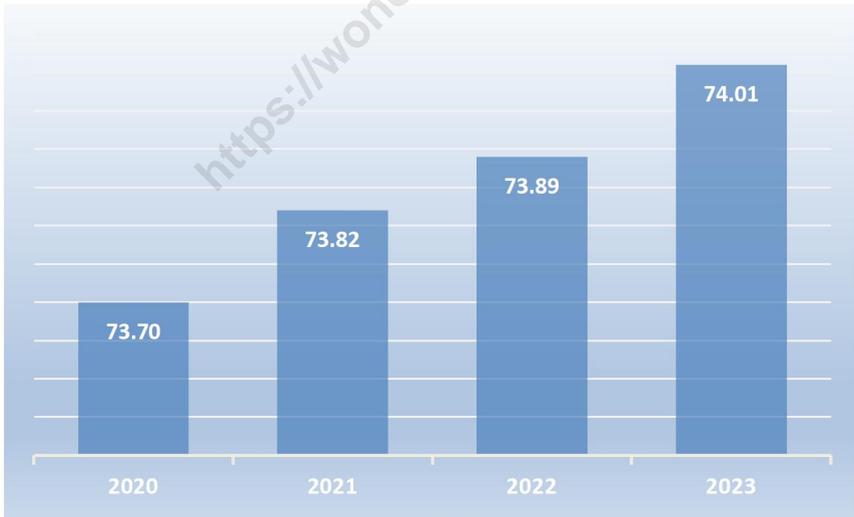


Gambar 3.3. Komponen Penghitungan IPM

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi ke dalam indikator input, proses, dan output. Misalnya, Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri

dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan, dan lain sebagainya (merupakan indikator proses). Umur harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini diharapkan mampu mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan seseorang. Akan tetapi usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membahas usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan.

Sejalan dengan capaian IPM di Kabupaten Wonosobo, Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat ini pun terus memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,31 poin. Pada 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Wonosobo sebesar 73,70 tahun, kemudian tahun 2023 telah mencapai 74,01 tahun.



Gambar 3.4. Umur Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2020-2023

Capaian UHH Kabupaten Wonosobo selama empat tahun terakhir berada di kisaran 73 dan 74 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Wonosobo akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 74 tahun. Sementara itu, tren UHH yang terus meningkat menunjukkan peluang bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat dapat disebabkan beberapa hal. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat, diduga turut memiliki andil dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat tersebut. Selain itu, faktor kesehatan balita dan ibu hamil, serta penyebab kematian pada usia balita dan saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.



Gambar 3.5. Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023

Selama 2023, berdasarkan keterbandingan secara kewilayahan se-eks Karesidenan Kedu, UHH Kabupaten Wonosobo menempati posisi ke-6, yaitu 74,01 tahun. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, Umur Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo tahun 2023 terpaut sebanyak 0,68 poin dengan Umur

Harapan Hidup Jawa Tengah mencapai 74,69 tahun. Ketertinggalan ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan, terutama pembangunan di bidang kesehatan.

3.3. Dimensi Pengetahuan

Terdapat 2 indikator dalam Dimensi Pengetahuan. Indikator tersebut adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berikut adalah capaian dari masing-masing indikator.

3.3.1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, harapan lama sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren didapatkan dari Direktorat Pendidikan Islam.



Gambar 3.6. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2016-2023

Selama kurun waktu 2016-2023, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren yang terus meningkat. Sampai dengan 2023, HLS Kabupaten Wonosobo mencapai 11,80 tahun. Angka ini meningkat 0,13 poin jika dibandingkan kondisi 2016 dan hanya meningkat 0,02 poin dari 2022. Capaian sebesar 11,80 tahun tersebut dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak berumur 7 tahun di masa mendatang adalah 11 tahun 9 bulan (setara kelas XII SMA). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-eks Karesidenan Kedu, HLS Kabupaten Wonosobo masih berada di peringkat paling bawah. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo masih di bawah capaian nasional (13,15) maupun Provinsi Jawa Tengah (12,85)



Gambar 3.7. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023

3.3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia pada Dimensi Pengetahuan, selain Harapan Lama Sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun ke

atas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum tepat untuk menanyakan rata-rata lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah sebesar 6,12 tahun. Nilai ini berarti bahwa penduduk umur 25 tahun ke atas mempunyai rata-rata lama sekolah 6,12 tahun atau setara dengan kelas enam di Sekolah Dasar (SD). Nilai ini terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah sudah mencapai 6,89 tahun atau setara dengan kelas satu di Sekolah Menengah Pertama (SMP).



Gambar 3.8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2016-2023

Sepanjang periode 2016-2023, tren Rata-rata Lama Sekolah terus mengalami peningkatan. Selama periode itu pula, indikator ini tumbuh sebesar 12,58 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 1,73 persen per tahun. Di sisi lain, Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan tingkat kemampuan baca tulis yang tinggi. Tingkat kemampuan baca

tulis di Kabupaten Wonosobo untuk penduduk usia 15 tahun ke atas sudah di atas 90 persen. Akan tetapi, capaian tersebut ternyata belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Kondisi ini seharusnya menyadarkan kita, terutama para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus mengusung isu strategis bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2023 berada pada urutan ke enam. Dengan capaian sebesar 6,89 tersebut, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo masih di bawah capaian nasional (8,77) maupun Provinsi Jawa Tengah (8,01).

Capaian masing-masing indikator pada Dimensi Pengetahuan di Kabupaten Wonosobo memiliki tren yang sama dengan capaian provinsi maupun nasional, sama-sama mengalami peningkatan capaian. Namun patut disayangkan, meskipun capaian pada dimensi ini terus meningkat, besarnya masih di bawah angka provinsi maupun nasional.



Gambar 3.9. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023

3.4. Dimensi Standar Hidup Layak

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampuan daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk. Alasan lainnya adalah karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti indeks *Purchasing Power Parity (PPP)* yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat, didapatkan bahwa metode terakhir adalah yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Selama kurun waktu 2016-2023, kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Wonosobo terus mengalami kenaikan. Selama periode itu pula, indikator ini tumbuh sebesar 16,13 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 2,55 persen per tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 sebesar 11,57 juta rupiah per tahun, naik sebesar 4,22 persen dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Wonosobo berada pada urutan kedua namun masih tertinggal dengan capaian Jawa Tengah yang sebesar 11,84 juta rupiah per tahun dan Indonesia yang sebesar 11,90 juta rupiah per tahun.



Gambar 3.10. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan per Tahun di Kabupaten Wonorejo, 2016-2023



Gambar 3.11. Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun untuk Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2023

BAB 4

Capaian dan Tantangan

<https://monosobokab.bps.go.id>

CAPAIAN DAN TANTANGAN

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Dengan kata lain, tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan, dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Pembangunan manusia yang masih terus bergulir di Indonesia hingga saat ini mencatat perkembangan yang menggembirakan. Hal-hal yang mendasar dalam peningkatan kualitas manusia semakin meningkat. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa persoalan dasar yang harus diselesaikan pada masa mendatang agar kualitas manusia Indonesia terus meningkat (BPS, 2016).

4.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Berpedoman pada Pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa kecuali. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status

ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Berdasarkan hal itu pula, dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Selanjutnya, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”, termasuk segala hal yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, maupun ketersediaan pengajar.

Dalam lingkup wilayah yang lebih sempit, peningkatan kapabilitas dasar penduduk, utamanya di bidang pendidikan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih fokus dengan berbagai macam upaya. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tengah berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka merealisasikan hal itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pun menyusun program dan target-target pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Pembangunan manusia yang semakin meningkat dengan pemerataan pendidikan yang layak, peningkatan mutu pendidikan, serta kemudahan akses terhadap pendidikan menjadi isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo pada periode tersebut.

Partisipasi Pendidikan Cukup Tinggi

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-

rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Kualitas sumber daya manusia dapat juga dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan atau keahlian, akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui capaian program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi sekolah (APS)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur.

$$APS\ 7 - 12\ tahun = \frac{Jumlah\ penduduk\ yang\ masih\ sekolah\ usia\ 7 - 12\ tahun}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 7 - 12\ tahun} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18, 19-24 tahun)

Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menjadi indikator ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

$$APM\ SD/MI = \frac{\text{Jumlah penduduk SD/MI usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$$

Catatan:

Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs usia 13-15 tahun,

SMA/SMK/MA usia 16-18 tahun

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Pemerintah berharap agar kedua indikator, APS dan APM, selalu meningkat setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal itu sebagai indikator yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 Tahun 2023 dari hasil Susenas Maret Tahun 2022 sebesar 99,78 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa sebanyak 99,78 persen penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 99,71 persen. Untuk usia 13-15 tahun, APS Kabupaten Wonosobo sebesar 92,80 persen di Tahun 2023 atau turun sebesar 1,22 poin dibanding Tahun 2022 yang sebesar 94,02 persen. Tingginya APS pada kedua kelompok umur, 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dalam bersekolah bisa jadi sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar duabelas tahun yang sudah dilaksanakan selama hampir satu dekade terakhir.

Kondisi APS untuk kelompok umur 16-18 tahun mengalami penurunan sebesar 0,11 poin, dari 65,18 persen di tahun 2022 menjadi 65,07 persen di tahun 2023. Walaupun belum sebesar APS 7-12 tahun, namun hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan, sampai dengan pendidikan menengah ke atas semakin dapat dinikmati dan dijangkau oleh sebagian besar masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi masih butuh kerja ekstra dari pemangku kebijakan terutama pada akses terhadap pendidikan menengah atas.

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang

cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

Tabel 4.1. APS menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	99,70	99,71	99,78
13-15	94,13	94,02	92,80
16-18	59,45	65,18	65,07

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, APM untuk jenjang pendidikan SD tahun 2023 mencapai 97,91 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 97,91 persen penduduk Kabupaten Wonosobo kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A. Dibandingkan kondisi 2022, APM Kabupaten Wonosobo 2023 untuk jenjang pendidikan tersebut mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 poin, dari yang semula 97,92 persen.

Meskipun sudah ditetapkan peraturan terkait batas usia masuk SD/ sederajat, namun beberapa orang tua murid terkesan mengharapkan putra/putri mereka yang berusia kurang dari 7 tahun untuk dapat bersekolah di SD/ sederajat, dengan alasan sudah mahir baca tulis. Alhasil, anak usia 6 tahun pun bisa bersekolah di SD/ sederajat, dengan syarat tertentu. Meski tidak mutlak, kondisi ini secara tidak langsung berperan dalam menyumbangkan besaran nilai APM SD/ sederajat di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 4.2. APM menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/Paket A	98,19	97,92	97,91
SMP/MTs/Paket B	77,61	77,95	81,63
SMA/SMK/Paket C	45,50	48,87	52,23

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berbeda dengan APM SD/ sederajat, APM Kabupaten Wonosobo 2023 untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat justru mengalami kenaikan jika dibandingkan kondisi 2022. Tercatat APM SMP/ sederajat mengalami kenaikan sebesar 3,68 poin dari 77,95 persen di tahun 2022 menjadi 81,63 persen di Tahun 2023. Sementara itu APM SMA/ sederajat juga mengalami kenaikan 3,36 poin dari 48,87 persen di tahun 2022 menjadi 52,23 persen di tahun 2023.

Tidak dipungkiri bahwa keadaan ekonomi rumah tangga memiliki andil cukup besar dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anggota rumah tangga. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah semakin tinggi tingkat pendidikan maka biaya akan semakin mahal. Hal ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait pembangunan pendidikan yang sudah dirancang maupun yang sebagian sudah dilaksanakan, demi mengejar ketertinggalan.

Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid kelas. Namun, karena ketersediaan data, dalam

bab ini hanya dibahas mengenai rasio murid guru, rasio murid sekolah, dan rasio guru sekolah.

Rasio murid guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar.



Gambar 4.1. Rasio Murid Guru Kabupaten Wonosobo, 2022-2023

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran pun cenderung semakin rendah.

Selama 2 tahun terakhir, rasio murid guru untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Wonosobo relatif stabil. Pada tahun 2023 rasio SD/MI mengalami penurunan agak tinggi, hal ini dikarenakan terjadi penambahan jumlah guru dan terjadi penurunan jumlah murid. Pada 2023, rasio SD/MI adalah 17,11, artinya setiap 1 orang guru mampu 17 murid SD/MI. Rasio murid guru SMP/MTs sebesar 14,95 dan SMA/SMK/MA Sederajat 16,26. Peningkatan rasio murid guru SMA/SMK/MA lebih disebabkan peningkatan jumlah murid lebih tinggi dibanding

peningkatan jumlah guru. Peningkatan rasio murid guru dikhawatirkan dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena beban guru menjadi bertambah.



Gambar 4.2. Rasio Murid Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2022-2023

Rasio murid sekolah menunjukkan rata-rata tingkat kepadatan yang dimiliki oleh satu sekolah. Tingkat kepadatan sekolah mempengaruhi murid untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan suasana yang nyaman. Penurunan rasio murid sekolah yang cukup signifikan terjadi di jenjang SMA/SMK/MA sederajat, dimana pada Tahun 2022 rasio murid sekolah sebesar 425,45 menjadi 420,44 pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena ada kenaikan jumlah sekolah di jenjang tersebut (bertambah 4 sekolah).

Tidak jauh berbeda dengan rasio murid guru, rasio guru sekolah juga relatif stabil, meskipun untuk jenjang pendidikan SD/MI sederajat rasionya mengalami sedikit peningkatan, yang semula 8,15 pada 2022 menjadi 8,65 pada 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah guru pada jenjang tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari sisi infrastruktur maupun ketersediaan tenaga pengajar sudah memadai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan semakin efektif. Sementara untuk jenjang pendidikan yang lain, rasio guru sekolah mengalami sedikit penurunan.



Gambar 4.3. Rasio Guru Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2022-2023

4.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

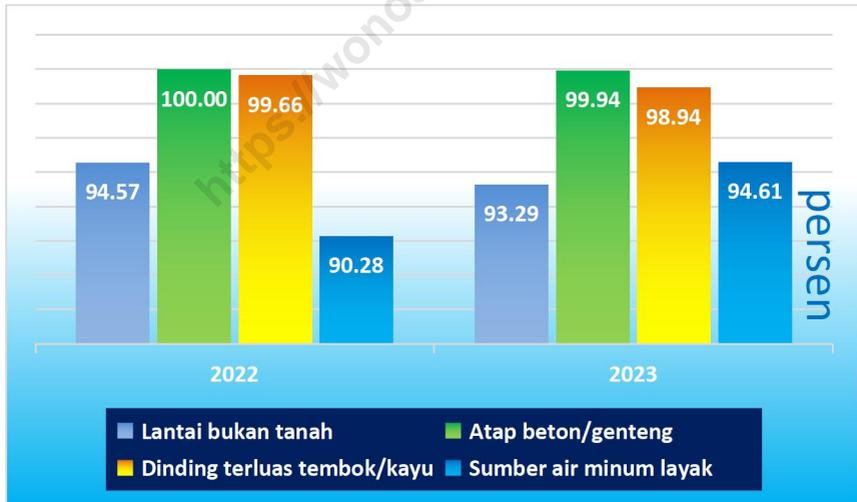
Kualitas Rumah Tinggal di Kabupaten Wonosobo Setahun Terakhir

Kualitas lingkungan rumah tinggal tentunya berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan menurut Kepmen (1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan rakyat.

Secara umum perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selain sebagai tempat tinggal, rumah seringkali menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.



Gambar 4.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023

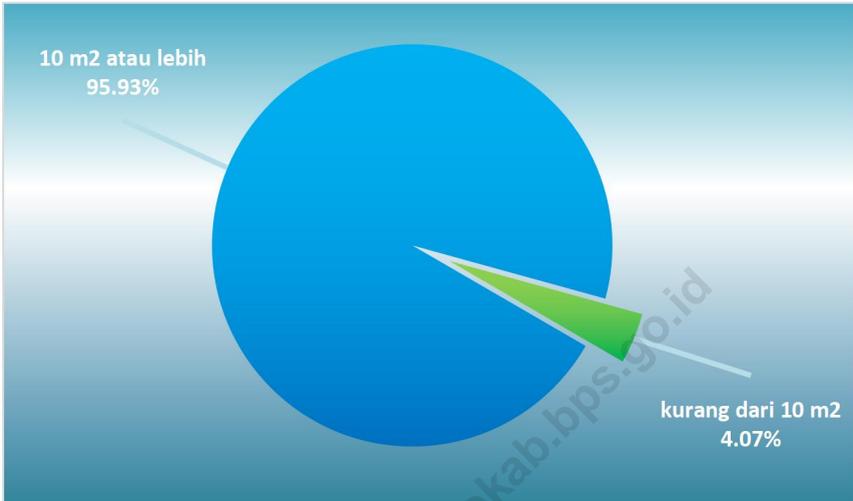
Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah

tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Berdasarkan data Susenas, jika dibandingkan dengan kondisi 2022, persentase rumah tangga di Kabupaten Wonosobo yang bertempat tinggal di rumah dengan lantai bukan tanah pada 2023 menunjukkan adanya penurunan 2,29 poin, yang semula 92,28 persen menjadi 94,57 persen. Berbeda dengan tren peningkatan untuk persentase lantai bukan tanah, rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah dengan dinding terluas tembok atau kayu pada 2022 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan 2021. Penurunan tersebut sebesar 1,28 poin, dari semula 94,57 persen menjadi 93,29 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap terluas. Dari hasil Susenas 2022 dan 2023 diperoleh bahwa di atas 95 persen rumah tinggal di Kabupaten Wonosobo sudah memenuhi kriteria atap yang layak, yaitu atap terluasnya terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, ataupun asbes. Berdasarkan kondisi yang ditunjukkan pada gambar 4.4 menunjukkan sebagian besar tempat tempat tinggal penduduk Kabupaten Wonosobo dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni. Namun perlu diwaspadai bahwa di tahun 2023 terjadi penurunan secara persentase pada beberapa indikator perumahan tersebut.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perumahan adalah luas lantai perkapita. Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai rumah perkapita adalah rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga. Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)* serta *American Public Health Organization (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2015).



Gambar 4.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Wonorejo, 2023

Menurut hasil Susenas 2023, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonorejo bertempat tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita 10 meter persegi ke atas. Hal ini memberi indikasi positif, karena sedikit jumlah rumah tangga dengan luas lantai per kapita yang sempit. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada 2023, berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh WHO dan APHA terdapat 95,93 persen rumah tangga di Kabupaten Wonorejo tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita yang ideal.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal dapat ditentukan dari kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada 2023, rumah tangga di Kabupaten Wonosobo yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak mencapai 29,34 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 32,32 persen. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan penggunaan sumber air dari sumur bor, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung untuk minum. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak meningkat sebesar 4,33 poin dari 90,28 persen menjadi 94,61 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya dalam menunjang kesehatan. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya.

Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada 2023, persentase rumah tinggal dengan jamban sendiri sebanyak 89,82 persen, naik 0,27 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 89,55 persen. Kondisi ini sejalan dengan rumah tangga yang menggunakan pembuangan akhir tinja dengan tangki septik atau IPAL yang mengalami peningkatan, yaitu dari 23,01 persen menjadi 27,88 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik, karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Untuk saat ini listrik PLN merupakan sumber penerangan yang paling konsisten untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022 maupun 2023, sebanyak 100 persen rumah tangga di Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan aliran listrik PLN di rumahnya.



Gambar 4.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Wonorejo, 2022-2023

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga

kesehatan tubuh. Menurut Hendrik L. Blum, seorang profesor *emeritus* administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor determinan munculnya masalah kesehatan, yaitu: faktor perilaku/gaya hidup (*life style*), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 1997).

Di antara keempat faktor tersebut, faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pencegahan, yang dapat dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Sementara itu, tiga faktor lain masih dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti: semakin memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat di kalangan masyarakat luas, serta memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan beberapa penyakit lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Gambar 4.7. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023

Berdasarkan jenis kelamin, hasil Susenas 2023 menunjukkan angka kesakitan penduduk laki-laki di Kabupaten Wonosobo menurun 3,17 poin dibandingkan 2022, yaitu dari 15,94 persen menjadi 12,77persen. Begitu pula angka kesakitan penduduk perempuan menurun sebesar 4,77 poin dari 18,11 persen menjadi 13,34 persen. Sejalan dengan keadaan kesakitan penduduk laki-laki dan perempuan, kondisi total penduduk juga menunjukkan penurunan dari 17,00 persen menjadi 13,05 persen atau turun sebesar 3,95 poin. Turunnya angka kesakitan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat meningkat di tahun 2023.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk, jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan

pelayanan kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk (kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya) serta jenis pelayanan kesehatan.

Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan data Susenas 2023, terdapat 23,82 persen penduduk Kabupaten Wonosobo yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 12,23 poin dibanding Tahun 2022 dimana penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan sebesar 36,05 persen. Menurunnya nilai ini menunjukkan tingkat kesakitan yang dialami penduduk semakin berkurang. Sedangkan sisanya, yaitu 76,18 persen penduduk memutuskan untuk tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan masyarakat selain berobat jalan tersebut, misalnya dengan mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Dilihat dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan mengalami penurunan yaitu dari 36,76 persen di Tahun 2022 menjadi 23,75 persen di Tahun 2023. Begitu pula untuk penduduk perempuan juga turun dari 33,40 persen menjadi 23,82 persen.



Gambar 4.8. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2022-2023

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS per Januari 2014, pada dasarnya diharapkan mampu membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum, untuk mendapatkan haknya guna memperoleh pelayanan kesehatan gratis, dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau. Di sisi lain, rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan tenaga ahli/spesialis di bidangnya seringkali memberikan stigma bahwa berobat itu mahal, walaupun beberapa biaya pengobatan sudah dicukupi oleh BPJS.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Wonosobo, 2021-2023

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	6,65	1,47	7,75
RS Swasta	5,53	4,53	5,75
Praktik Dokter/Bidan	64,35	41,34	36,71
Klinik/Praktik Dokter Bersama	4,44	7,46	10,21
Puskesmas/Pustu	15,89	44,20	30,50
UKBM*	5,47	3,16	9,96
Praktik Tradisional/alternatif	2,22	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	2,19

*) UKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)

Sumber: Susenas

Preferensi pemanfaatan fasilitas kesehatan yang dipilih penduduk yang mengalami keluhan kesehatan untuk berobat di tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan perubahan. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke rumah sakit pemerintah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 sebanyak 7,75 persen penduduk yang sakit berobat jalan ke rumah sakit pemerintah, meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,47persen. Sedangkan untuk rumah sakit swasta sebanyak 5,75 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang

sebanyak 4,53 persen. Terjadi penurunan preferensi berobat jalan di praktik dokter/bidan dari 41,34 persen di tahun 2022 menjadi 36,71 persen di tahun 2023. Walaupun terjadi penurunan berobat di praktik dokter/bidan tetapi di tahun 2023 menjadi pilihan utama masyarakat sebagai tempat berobat jalan. Masyarakat yang berobat jalan di klinik/praktik dokter bersama mengalami peningkatan dari 7,46 persen di tahun 2022 menjadi 10,21 persen di tahun 2023. Terjadi penurunan persentase berobat jalan di puskesmas/pustu dari 44,20 persen menjadi 30,50 persen. Meningkatnya persentase berobat jalan di praktik dokter/bidan kemungkinan disebabkan karena fasilitas pelayanan kesehatan tersebut lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan untuk pemanfaatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) sudah mulai banyak menjadi pilihan masyarakat untuk berobat. Hal ini bisa dilihat dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat ke UKBM seperti Poskesdes dan Posyandu tahun 2023 sebesar 9,96 persen.

4.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang termasuk ekonomi. Hasilnya pun terlihat melalui pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir, yang sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan menjadi 4,30 persen, hal ini juga sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah yang juga mengalami perlambatan menjadi 4,98 persen. Fluktuasi besarnya nilai pertumbuhan ekonomi tiap tahun menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo sebesar -1,64 persen, nilai ini turun drastis dibanding pertumbuhan ekonomi di Tahun 2019 yang sebesar 5,57 persen sebagai dampak dari pandemi covid-19. Berdasarkan lapangan usaha di tahun 2023, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 9,68 persen, kemudian diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan 9,37 persen, jasa lainnya 9,27 persen, serta konstruksi dengan pertumbuhan 8,51 persen. Pasca covid-19, semua pertumbuhan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Lapangan

usaha yang mempunyai nilai pertumbuhan terendah di tahun 2023 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,49 persen.



Gambar 4.9. Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo, 2016-2023

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi harus juga dibarengi dengan akselerasi penurunan jumlah penduduk miskin. Selama dua tahun terakhir persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan. Dari Tahun 2016 hingga 2023, persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan yang cukup tinggi, sebesar 4,95 poin, yaitu dari 16,63 persen di tahun 2016 menjadi 15,58 persen di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo melalui berbagai program intervensi kebijakan yang sudah dilaksanakan selama ini.

Tantangan ke depan yang semakin berat tentu memerlukan kebijakan yang tepat. Evaluasi mengenai bagaimana kondisi dan potensi perekonomian Kabupaten Wonosobo akan sangat diperlukan untuk meningkatkan sasaran pembangunan dan lebih fokus lapangan usaha mana yang harus lebih digarap

dengan serius. Pemahaman mengenai struktur dan fundamental ekonomi Kabupaten Wonosobo akan sangat menentukan arah kebijakan yang akan diambil.

Di sisi lain, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terlihat fluktuatif. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Wonosobo meningkat cukup tajam menjadi 5,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebagai dampak dari adanya COVID-19. Namun demikian, TPT Kabupaten Wonosobo mengalami tren penurunan sehingga menjadi 4,95 persen pada tahun 2023. Dari gambar 4.10 juga terlihat bahwa tren TPT kabupaten Wonosobo sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan secara nilai pun juga selalu lebih rendah.



Gambar 4.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah, 2017-2023

Pengangguran disini adalah penduduk yang tidak bekerja namun mempunyai keinginan untuk masuk ke dunia kerja, yaitu dengan mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, bisa juga penduduk yang belum bekerja namun sudah diterima kerja dan sedang menunggu waktu mulai bekerja, atau juga penduduk yang tidak bekerja namun tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha karena sudah putus asa. Sedangkan penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak masuk dalam klasifikasi di

atas bukan masuk dalam kategori pengangguran, namun masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.

Angka pengangguran sangat penting karena sebagai salah satu indikator tolak ukur keberhasilan pemerintah terkait penciptaan atau penyediaan lapangan kerja, atau dengan kata lain menjadi hak bagi setiap penduduk yang termasuk dalam usia kerja (Kuncoro, 2015; 66). Namun yang lebih utama, indikator ini seringkali digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, selain angka kemiskinan tentunya. Sehingga diperlukan untuk menurunkan tingkat pengangguran. Sehingga diharapkan jika terjadi penurunan TPT di Kabupaten Wonosobo, mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

<https://wonosobokab.go.id>

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

Jl. Mayjend Bambang Sugeng km 2,2 Wonosobo

Telp: (0286) 324270 Fax: (0286) 3325380

Homepage: <http://wonosobokab.bps.go.id> E-mail: bps3307@bps.go.id